

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional sehingga Indonesia mampu memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). (<https://www.bi.go.id/>)

Indonesia memiliki ekonomi pasar di mana perusahaan milik negara (BUMN) dan kelompok usaha swasta besar maupun kecil UMKM memainkan peran penting. Ada ratusan kelompok swasta yang terdiversifikasi yang berbisnis di Indonesia. Bersama dengan para BUMN mereka mendominasi perekonomian domestik. Ini juga berarti bahwa kekayaan terkonsentrasi di bagian atas masyarakat. Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia, yang bersama-sama berkontribusi 99 persen dari jumlah total perusahaan yang aktif di Indonesia dan tidak kalah pentingnya. Pelaku UMKM menyumbang sekitar 60 persen dari PDB Indonesia dan menciptakan lapangan kerja untuk hampir 108 juta orang Indonesia. Ini berarti bahwa usaha mikro, kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Ada tanda-tanda bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai mempercepat lagi setelah perlambatan ekonomi di tahun 2017 - 2020. (<https://www.indonesia-investments.com/>)

Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US\$4.783,9. Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. (<https://www.bps.go.id/>)

Salah satu contoh problem spesifik yang dihadapi masyarakat tunadaya dalam bidang akses faktor produksi modal. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat lemah adalah dalam hal akses untuk memperoleh modal. Dalam pasar uang, masyarakat perdesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah, terus didorong untuk meningkatkan tabungan. Masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar dengan pihak lembaga keuangan. Contoh yang lebih umum dari problem spesifik yang dihadapi masyarakat tunadaya. Seperti diketahui bahwa salah satu dari tujuan akhir pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya pendapatan masyarakat lemah. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. (<http://eprints.unm.ac.id/>)

Dalam aspek kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan di Indonesia ditandai dengan pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs*) yang semakin tinggi. Masyarakat yang kaya juga semakin banyak. Hingga Desember 2020, sebanyak 185.273 rekening masyarakat yang memiliki tabungan lebih besar dari Rp 2 miliar dan sebanyak 108.535 rekening tabungan masyarakat di atas Rp 5 miliar Hal ini tidak pernah terjadi pada masa dua atau tiga dekade yang lalu. “ekonomi kesejahteraan sosial adalah

bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang”. *Pigou dalam Sasana, 2009. (<https://new.widyamataram.ac.id/>)*

Kesejahteraan masyarakat ialah titik ukur bagi suatu masyarakat yang telah berada pada keadaan lebih sejahtera daripada sebelumnya Kadeni & Srijani (2020). Kesejahteraan berarti dapat memenuhi kebutuhan pokok atau sandang, pangan, dan papan tanpa adanya kesusahan. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang meliputi indikator kesehatan, ekonomi, dan pendidikan (Kadeni & Srijani, 2020). Untuk itu, sejak dulu UMKM telah menjadi sebuah senjata bagi Indonesia dalam membantu ekonomi rakyat. Semakin banyak UMKM yang ada di masing-masing daerah, dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Atsna Himatul Aliyah 2020 (<https://jurnal.unsil.ac.id/>)*

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM menjadi salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara. Dalam kondisi ekonomi yang belum kondusif, pengembangan kegiatan usaha kecil dan menengah dianggap sebagai salah satu alternatif penting yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Saat ini peningkatan kinerja UMKM masih dilanda berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi persaingan. Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pengusaha UMKM dalam meningkatkan kinerja usahanya adalah keterbatasan modal yang dimiliki. Maka dari itu, UMKM perlu dikembangkan karena, distribusi kesempatan kerja menurut skala usaha

menegaskan bahwa UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. *Amin Dwi Ananda* (<https://ejournal.umm.ac.id/>).

Peran Pemerintahan, dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program lainnya dari. Program-program ini diharapkan nantinya memperkecil beban ekonomi masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong kemampuan masyarakat untuk mendapat pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. (<http://www.kemenkopmk.go.id>,)

Program KUR yang telah disalurkan pemerintah sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, telah melalui beberapa evolusi kebijakan, khususnya skema penyalurannya. KUR yang disalurkan pada tahun 2007 – 2014 menggunakan skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP), sedangkan KUR generasi kedua yang disalurkan sejak Agustus 2015 sampai dengan saat ini, disalurkan dengan skema subsidi bunga. total realisasi penyaluran KUR sampai saat ini masih belum maksimal karena KUR masih didominasi dengan penyaluran kepada pihak - pihak yang memiliki usaha tergolong besar dan lebih sedikit penyalurannya terhadap pihak usaha kecil mikro menengah. Program sosialisasi KUR kepada masyarakat pun tidak cukup hanya dilakukan oleh bank-bank penyalur. Karena untuk membuka akses masyarakat terhadap KUR di luar Jawa tidak bisa hanya mengandalkan pihak perbankan. Keterlibatan Pemerintah Daerah, Kementerian terkait, dan institusi masyarakat menjadi salah satu kunci untuk memperluas penyaluran KUR. Pemerintah daerah sebagai institusi pemerintah terdekat dengan masyarakat diharapkan aktif melakukan identifikasi potensi lokal untuk mengangkat usaha asli daerah yang prospektif untuk dikembangkan. Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat khususnya di Sektor Produksi seperti

pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, dan jasa produksi melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). (<https://kur.ekon.go.id/>)

Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi khususnya UMKM, Pemerintah menetapkan beberapa perubahan kebijakan KUR, antara lain perubahan plafon KUR Mikro (tanpa agunan tambahan) yang sebelumnya di atas Rp10 juta s.d. Rp50 juta menjadi di atas Rp10 juta s.d. Rp100 juta, perubahan KUR Khusus/Klaster tanpa pembatasan akumulasi plafon KUR untuk sektor produksi (non-perdagangan), perubahan kebijakan KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) termasuk penyesuaian plafon KUR Penempatan PMI dari maksimal Rp25 juta menjadi maksimal Rp100 juta, serta perubahan dan perpanjangan relaksasi kebijakan KUR. Relaksasi kebijakan KUR yang dimaksud di atas terdiri dari KUR kecil tanpa pembatasan akumulasi plafon KUR s.d. 31 Desember 2022, Penundaan target sektor produksi s.d. 31 Desember 2022 atau sesuai dengan pertimbangan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Pemberian insentif lanjutan berupa perpanjangan restrukturisasi KUR, Pemberian relaksasi administrasi bagi calon debitur KUR pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan penilaian obyektif penyalur KUR. (<https://www.kominfo.go.id/>)

Selanjutnya Bank Mandiri mengeluarkan program restrukturisasi kredit terhadap para pelaku UMKM yang meminjam KUR sebagai bagian dari program pinjaman dengan maksud meringankan beban para pelaku UMKM yang melakukan peminjaman KUR, sehingga pinjaman KUR dapat dilunasi oleh para pelaku UMKM dengan jangka waktu tertentu tersebut. (<https://keuangan.kontan.co.id/>)

Relaksasi kebijakan KUR telah berpengaruh terhadap permintaan KUR yang sudah melampaui pola normalnya dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Permintaan KUR menunjukkan peningkatan dari rata-rata per bulan sebesar Rp11,7 triliun pada tahun 2019 (pra pandemi Covid-19) menjadi Rp16,5 triliun pada tahun 2020 dan Rp23,7 triliun pada tahun 2021.

Perekonomian di wilayah Pluit meliputi beberapa aspek unggulan seperti Industri pengolahan makanan, perikanan dan perdagangan. Dalam 3 aspek tersebut memberikan kontribusi besar dalam perekonomian masyarakat sehingga keadaan ekonomi dapat bertumbuh dari tahun ke tahun serta dapat membantu menumbuhkan pemasukan kepada pemerintah sehingga dapat membantu perekonomian di daerah tersebut.

Tabel 1.1

**Data Sektor UMKM yang layak dibiayai KUR oleh Bank Mandiri
CBD Pluit di wilayah Kecamatan Penjaringan**

No	Sektor	Jumlah UMKM	Status
1	Indiustri Pengolahan	70	Aktif
2	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12	Aktif
3	Jasa Persewaan, sewa guna Usaha, agen perjalanan dll	16	Aktif
4	Jasa Profesional ilmiah, dan teknis	0	Tidak Aktif
5	Kegiatan Jasa lainnya	5	Aktif
6	Penyediaan akomodasi dan Penyediaan makan minum	16	Aktif
7	Bengkel Perawatan Mobil, motor	7	Aktif
8	Perikanan	35	Aktif

Sumber : Data Base UMKM Bank Mandiri CBD Pluit 2020 – 2022

Industri Pengolahan Keberadaan perusahaan industri sangat berpengaruh pada kehidupan perekonomian masyarakat, karena usaha industri ini mampu menyerap tenaga kerja dan sebagai salah satu mata

pencapaian masyarakat sekitarnya. Perusahaan industri besar/ sedang yang berada di Kecamatan Penjaringan mencapai 49,50 persen dari total perusahaan industri besar/ sedang di Jakarta Utara. Sebagai daerah pantai yang merupakan daerah penghasil ikan dan biota laut lainnya, industri pengolahan ikan dan biota laut juga banyak dijumpai di wilayah ini. Pada umumnya industri pengolahan ikan dan biota laut masih bersifat tradisional sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Tabel 1.2

Jumlah Perusahaan Industri Sedang/Kecil dan Tenaga Kerja (UMKM) Menurut Kelurahan Penjaringan 2021

Kelurahan	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
Kamal Muara	53	14.881
Kapuk Muara	58	7.404
Penjagalan	64	4.125
Penjaringan	55	6.132
Pluit	21	1.032
Total	251	32.869

Sumber : BPS DKI Jakarta 2022

Pada tahun 2022 jumlah perusahaan industri Sedang/Kecil mencapai 251, yang tersebar di seluruh kelurahan. Di Kelurahan Pejagalan mencapai 64 perusahaan, merupakan yang terbanyak dibandingkan kelurahan lainnya. Sedangkan perusahaan industri besar/ sedang yang paling sedikit berada di Kelurahan Pluit yang hanya ada 21 perusahaan industri. Sementara total jumlah tenaga kerja perusahaan industri di Kecamatan Penjaringan mencapai 32.869 orang. Tenaga kerja perusahaan industri besar/ sedang terbanyak berada di Kelurahan Kamal Muara yang mencapai 14.181 orang, sementara itu tenaga kerja perusahaan industri Sedang/Kecil paling sedikit berada di Kelurahan Pluit yang hanya berjumlah 1.032 orang.

UMKM adalah salah satu usaha yang dilakukan sebagian masyarakat di Kecamatan Penjaringan untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat di Kelurahan Penjaringan adalah Pedagang Pakaian, Pedagang makanan, Industri Pengolahan Makanan, Nelayan, Bisnis Properti, dan lain sebagainya. UMKM masih terkendala dengan modal sehingga dengan adanya program KUR usaha-usaha kecil dapat terbantu dalam mengembangkan usahanya, mereka hanya perlu melaporkan surat Keterangan usaha mereka di Kantor Kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan usaha sebagai syarat untuk mengajukan kredit modal usaha pada Bank Mandiri Cabang CBD Pluit.

Menanggapi permasalahan yang ada tersebut Pemerintah meluncurkan PERMENKO No. 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Salah satu langkah penting dari implementasi Peraturan ini adalah peluncuran program KUR kepada Lembaga keuangan Bank maupun Koperasi sebagai penyalur KUR untuk masyarakat yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah. Sesuai dengan isi pasal 2 didalam PERMENKO No. 8 Tahun 2019 yang berbunyi Pelaksanaan KUR bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, Lalu kemudian meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan daya saing Usaha Kecil Mikro Menengah.

Berdasarkan data dari Bank Mandiri tahun 2020-2022 dari 161 pelaku UMKM terdapat 33 masyarakat UMKM di wilayah Jakarta utara yang belum mengetahui akan adanya program KUR dan masyarakat yang mengetahui program KUR juga belum mendapat pemberdayaan yang dilakukan oleh penyelenggara program KUR. Berdasarkan hasil data evaluasi dari Bank Mandiri terhadap para nasabah KUR yaitu kurangnya ilmu manajemen keuangan yang baik yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola uang untuk berwirasusaha, sehingga masih banyaknya masyarakat yang juga penerima KUR tetapi tidak bisa mengelola

keuangannya dengan baik yang akibatnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak berjalan dengan baik, disamping itu masyarakat tidak menerima pelatihan apapun mengenai pengembangan kompetensi bisnis UMKM sehingga kurangnya ilmu dan inovasi dalam mengelola usaha yang dilakukan masyarakat tersebut. Selanjutnya kurangnya pengembangan jaringan bisnis yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memudahkan UMKM untuk mengembangkan bisnisnya sehingga pelaku UMKM bisa mendapatkan kesejahteraan. (*Database Bank Mandiri*)

Berdasarkan hasil wawancara pra riset yang dilakukan kepada pelaku UMKM bahwa masyarakat yang kekurangan modal dan mengetahui program KUR sebagian enggan memilih program KUR dikarenakan beberapa alasan seperti tidak tahu prosedur dan kurangnya pengetahuan dan tatacara dalam peminjaman uang di Bank, prosedur sulit dan berbelit – belit, bagi yang tidak mempunyai agunan atau jaminan sebagai salah satu syarat peminjaman

Tabel 1.3

**Data nasabah penerima KUR di Bank Mandiri CBD Pluit tahun 2021
-2022**

No	Unit Cabang	Nama Debitur	Produk	Angsuran	Pinjaman	Keterangan
1.	Cabang CBD Pluit	PARDI AL MOH SODIQ	KUR	2.465.928	10.000.000	Lancar
2.	Cabang CBD Pluit	HJ NUR HIKMAH	KUR	3.346.413	15.000.000	Lancar
3.	Cabang CBD Pluit	VIKTOR SULTONI	KUR	8.219.760	55.000.000	Lancar
4.	Cabang CBD Pluit	RIDWAN ARGAS PRASETYA	KUR	8.864.122	80.000.000	Bermasalah
5.	Cabang CBD Pluit	ISMAIL PADU	KUR	6.084.387	30.000.000	Lancar
6.	Cabang CBD Pluit	SAMRIANTO	KUR	4.259.071	20.000.000	Lancar
7.	Cabang CBD Pluit	NISANDI	KUR	10.213.286	100.000.000	Lancar
8.	Cabang CBD Pluit	DARWATI	KUR	4.563.291	30.000.000	Bermasalah
9.	Cabang CBD Pluit	KADIM	KUR	4.697.006	30.000.000	Lancar
10.	Cabang CBD Pluit	ELAH HAYATI	KUR	6.648.092	30.000.000	Bermasalah
11.	Cabang CBD Pluit	ABDUL HARIS	KUR	2.583.353	20.000.000	Lancar
12.	Cabang CBD Pluit	MUHAMAD NUR	KUR	10.512.214	100.000.000	Lancar
13.	Cabang CBD Pluit	UPI WEDAR WIJAYANTI	KUR	8.219.760	100.000.000	Lancar

No	Unit Cabang	Nama Debitur	Produk	Angsuran	Pinjaman	Keterangan
14.	Cabang CBD Pluit	SUMARNI	KUR	3.650.632	30.000.000	Bermasalah
15.	Cabang CBD Pluit	HARTANTO	KUR	6.648.092	50.000.000	Lancar
16.	Cabang CBD Pluit	ABDUL ROHMAN	KUR	2.465.928	10.000.000	Lancar
17.	Cabang CBD Pluit	MARUDIN	KUR	1.064.768	10.000.000	Lancar
18.	Cabang CBD Pluit	INDAH KRISTIA NINGSIH	KUR	4.653.664	200.000.000	Lancar
19.	Cabang CBD Pluit	NAMAS BINTI NAMIN	KUR	3.194.303	25.000.000	Lancar
20.	Cabang CBD Pluit	NUSROTUL LAELIYAH	KUR	1.772.824	30.000.000	Lancar
21.	Cabang CBD Pluit	ANGGA RAMADHANI	KUR	2.216.031	30.000.000	Bermasalah
22.	Cabang CBD Pluit	MAMUN	KUR	2.216.031	30.000.000	Lancar
23.	Cabang CBD Pluit	SHOKHIBI	KUR	3.757.605	25.000.000	Bermasalah
24.	Cabang CBD Pluit	AGUSTINAH	KUR	9.126.581	50.000.000	Lancar
25.	Cabang CBD Pluit	YUNITA	KUR	2.911.587	30.000.000	Bermasalah
26.	Cabang CBD Pluit	DJAYA SUPENA	KUR	1.852.626	10.000.000	Lancar
27.	Cabang CBD Pluit	YANTO	KUR	912.658	15.000.000	Lancar
28.	Cabang CBD Pluit	QOTRUN NADA	KUR	3.087.710	30.000.000	Lancar
29.	Cabang CBD Pluit	SITI MASITOH	KUR	2.216.031	30.000.000	Bermasalah
30.	Cabang CBD Pluit	EDI SUHENDI	KUR	1.521.097	30.000.000	Lancar
31.	Cabang CBD Pluit	RASIMUN	KUR	2.216.031	20.000.000	Lancar
32.	Cabang CBD Pluit	KARTINI	KUR	1.108.015	25.000.000	Bermasalah
33.	Cabang CBD Pluit	KASINI	KUR	1.746.952	35.000.000	Lancar
34.	Cabang CBD Pluit	YUNI SUKAESIH	KUR	1.329.618	30.000.000	Lancar
35.	Cabang CBD Pluit	KARTINI	KUR	2.216.031	30.000.000	Lancar
36.	Cabang CBD Pluit	NIWAYAN NELIYUNINGSI	KUR	3.866.560	45.000.000	Bermasalah
37.	Cabang CBD Pluit	ACHMAD NURCHOLIS	KUR	1.521.097	30.000.000	Lancar
38.	Cabang CBD Pluit	WIDODO SETYADI	KUR	3.522.754	50.000.000	Bermasalah
39.	Cabang CBD Pluit	TUSIRAN	KUR	2.281.645	40.000.000	Lancar
40.	Cabang CBD Pluit	MUNAWATI	KUR	1.521.097	30.000.000	Bermasalah
41.	Cabang CBD Pluit	ULLY MARSALINA	KUR	10.793.676	100.000.000	Lancar
42.	Cabang CBD Pluit	IRAWATI	KUR	1.455.793	30.000.000	Lancar
43.	Cabang CBD Pluit	IIM MASOLAH	KUR	1.329.618	30.000.000	Bermasalah
44.	Cabang CBD Pluit	AMININGSIH	KUR	8.864.122	50.000.000	Bermasalah
45.	Cabang CBD Pluit	ERNI SUSILAWATI	KUR	1.079.368	30.000.000	Lancar
46.	Cabang CBD Pluit	SUYATNO	KUR	9.126.581	100.000.000	Bermasalah
47.	Cabang CBD Pluit	MUH DIMAS WIGUNA	KUR	1.521.097	10.000.000	Lancar
48.	Cabang CBD Pluit	HARRY MULIA	KUR	3.346.413	30.000.000	Lancar
49.	Cabang CBD Pluit	BRURIKA IKHSAN SOFIA	KUR	1.521.097	10.000.000	Lancar

No	Unit Cabang	Nama Debitur	Produk	Angsuran	Pinjaman	Keterangan
50.	Cabang CBD Pluit	LAELA FITRIAH	KUR	5.823.173	50.000.000	Bermasalah
51.	Cabang CBD Pluit	DIRNO BIN SUPANCAR	KUR	3.042.194	30.000.000	Lancar
52.	Cabang CBD Pluit	JAMBAK SARYANTO	KUR	2.348.503	20.000.000	Lancar
53.	Cabang CBD Pluit	SUGIANTO	KUR	8.219.760	100.000.000	Bermasalah
54.	Cabang CBD Pluit	AUFA HANIFAH	KUR	3.042.194	30.000.000	Lancar
55.	Cabang CBD Pluit	SULAIMAN	KUR	2.345.673	25.000.000	Bermasalah
56.	Cabang CBD Pluit	DANONAH	KUR	7.045.509	100.000.000	Lancar
57.	Cabang CBD Pluit	SUKARNA	KUR	1.329.618	30.000.000	Lancar
58.	Cabang CBD Pluit	RAMIN	KUR	3.522.754	30.000.000	Lancar
59.	Cabang CBD Pluit	LISA SETYANINGRUM	KUR	4.697.006	50.000.000	Bermasalah
60.	Cabang CBD Pluit	LAILI KURNIA	KUR	1.108.015	30.000.000	Lancar
61.	Cabang CBD Pluit	LUTFI MUKSIN	KUR	2.151.661	20.000.000	Lancar
62.	Cabang CBD Pluit	RUKMINI	KUR	10.327.972	100.000.000	Lancar
63.	Cabang CBD Pluit	SAMSURI	KUR	3.597.892	30.000.000	Lancar
64.	Cabang CBD Pluit	FAHRI ROMADON	KUR	2.433.755	25.000.000	Lancar
65.	Cabang CBD Pluit	SAUDI	KUR	3.042.194	25.000.000	Bermasalah
66.	Cabang CBD Pluit	SITI AISYAH	KUR	5.823.173	40.000.000	Lancar
67.	Cabang CBD Pluit	ISMIATUN	KUR	3.042.194	30.000.000	Lancar
68.	Cabang CBD Pluit	DWI AJENG ANGGITA	KUR	2.585.865	30.000.000	Lancar
69.	Cabang CBD Pluit	ROSIH HARYANI	KUR	1.455.793	30.000.000	Lancar
70.	Cabang CBD Pluit	AGUS SUPIAN	KUR	2.465.928	30.000.000	Lancar

Sumber : Data Penerima KUR Bank Mandiri CBD Pluit tahun 2022

Berdasarkan data dari Kantor Cabang Bank Mandiri CBD Pluit dari 70 nasabah kur terhitung dari januari 2022 sampai saat ini 39 nasabah sebagai pelaku KUR yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menjalankan program KUR salah satunya kredit macet sehingga masalah ini juga perlu diperhatikan oleh pihak penyelenggara program KUR salah satunya Bank Mandiri CBD Pluit sehingga meminimalisir terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh nasabah tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul "**Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mandiri Cabang CBD Pluit dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Warga di Wilayah Kelurahan Penjarangan**"

1.2 Identifikasi, Pembatasan, Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang di ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- 1 Masih banyaknya pelaku UMKM yang sulit mengajukan program KUR
- 2 Kurangnya Koordinasi dari Pihak Pemerintah terkait Program Kredit Usaha Rakyat yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk pelaku UMKM.
- 3 Masih Kurangnya Pengetahuan Warga Masyarakat terkait pentingnya Pengelolaan dana KUR yang optimal

1.2.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, dan sempurna, maka permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penelitian ini hanya berkaitan dengan bagaimana Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri CBD Pluit dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM warga di wilayah Kelurahan Penjaringan.

1.2.3 Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas program KUR Bank Mandiri Cabang CBD Pluit dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri Cabang CBD Pluit dalam meningkatkan kesejahteraan
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat Bank Mandiri CBD Pluit

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari segi teoritis dan praktis:

1. Teoritis

Manfaat yang diberikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan didalam kajian implementasi kebijakan khususnya terkait kebijakan terhadap pengembangan UMKM.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan khususnya bagi pelaku UMKM, Bank Mandiri, maupun Pemerintah

- **UMKM:** Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terkait pelaku umkm yang tidak memiliki modal usaha tetapi membutuhkan modal untuk usahanya melalui program KUR
- **Bank Mandiri :** Hasil penelitian ini menjadi masukan dan informasi bagi pihak mandiri agar mempermudah proses penyaluran KUR terhadap masyarakat
- **Pemerintah :** Hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi terhadap kebijakan KUR tentang pemberdayaan maupun pelatihan bagi UMKM terkait pengelolaan usaha maupun pengelolaan keuangan